

MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN MELALUI PROGRAM KEUANGAN MIKRO SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT (PROGRAM MISYKAT DPU-DT)

Arif Pujiyono

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang

e-mail: eprints.undip.ac.id

Abstract

Poverty is a problem that caused the failure of economic systems. Women have great potential in helping to overcome poverty. Indonesia has great potential to optimize the social fund an independent source of Zakat, and alms infak (ZIS) through empowerment of the poor. This research is to analyze financial assistance to community-based micro-sharia (Misykat) DPU-DT in Central Java. The results showed that the program can improve that Misykat welfare poor women. Wilcoxon different test results Misykat program can increase consumption, income, profits and savings of poor women beneficiaries Misykat. Additionally, the program Misykat increasing empowerment of poor women, shoft their skill level increases based on the size of confidence, business skills, business success and the science of religion.

Keywords: *Poverty, ZIS, misykat, DPU-DT, women's empowerment.*

LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan di negara berkembang termasuk Indonesia, ternyata gagal mencapai tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh. Strategi pembangunan berfokus pertumbuhan dengan mengandalkan industrialisasi gagal mewujudkan hakikat pembangunan, di mana tidak mampu mereduksi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Kemiskinan adalah fenomena yang mudah ditemukeni di beberapa pelosok di Indonesia dan perempuan merupakan pihak yang paling berat menanggung dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan (Todaro, 2003). Isu kemiskinan selalu menjadi pusat perhatian kebijakan ekonomi, bahkan sering menjadi komoditas politik. Terlepas dari perdebatan yang terjadi tentang kesahihan data kemiskinan, yang jauh lebih penting adalah bagaimana menentukan strategi pengentasan kemiskinan yang tepat untuk Indonesia.

Di Indonesia, gerakan nasional penanggulangan kemiskinan melalui program-program pengentasan kemiskinan dimulai sejak masa awal orde baru melalui Program Pembangunan Keluarga Sejahtera (KB) tahun 1970, Program Terpadu Keluarga Sejahtera (Prokesra) untuk Memantapkan Program Menghapus Kemiskin-

an (MPMK), Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos) dan berbagai program terkait lainnya melalui dukungan SDM (pendidikan, kejuruan), dukuangan dana (Kukesra, KUK, KKPA, KKUD, modal ventura) dan program dukungan kemitraan dan peluang usaha (BPS, 2005:24-29). Pemerintah Indonesia dalam 5 tahun terakhir menggalakkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Bahkan dalam MGD's menargetkan bagi 191 negara-negara anggota PBB agar dapat mengurangi jumlah kemiskinan hingga mencapai 50 persen pada tahun 2015.

Kemiskinan di Indonesia masih relatif besar, apalagi krisis ekonomi tahun 1997 semakin memperbanyak jumlah penduduk miskin di Indonesia, meningkat 31,29 persen pada tahun 1998. Data statistik BPS selama Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan terjadinya penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Akan tetapi, setelah terjadi "kontroversi" atas pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, data kemiskinan tahun 2006, jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 39,5 juta jiwa atau 17,75 persen dari total penduduk. Pada tahun 2007 angka kemiskinan berkurang menjadi 37,17 juta jiwa atau 16,58 persen. Data tahun 2008 kemiskinan berkurang menjadi

34,24 juta jiwa atau 15,23 persen. Meskipun telah terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin masih tetap menjadi kendala dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk miskin akan semakin besar apabila metode pengukuran menggunakan Bank Dunia sebesar US\$ 2 perkapita perhari.

Dalam dinamika sistem ekonomi beberapa dekade terakhir, sistem ekonomi Islam mulai mendapat perhatian dunia. Apalagi sejak terjadinya berbagai krisis ekonomi, sampai krisis krisis keuangan global, sistem ekonomi islam terbukti mampu bertahan menghadapi gejolak krisis. Dalam sistem ekonomi islam yang komprehensif, ternyata juga memiliki program mengatasi kemiskinan melalui dana sosial mandiri zakat, infak dan sedekah (ZIS). Dengan potensinya yang besar, maka pada hakikatnya ZIS mampu menjadi salah satu alternatif kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. ZIS efektif mengatasi kemiskinan karena target sarannya telah jelas, yaitu fakir miskin. ZIS juga efisien mengatasi kemiskinan, khususnya jika dikembangkan suatu usaha produktif.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang signifikan, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah besar dalam perekonomian nasional. Masalah kemiskinan adalah salah satu potret kelabu dalam proses pemulihan ekonomi nasional pascakrisis 1997. Seiring pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, jumlah kemiskinan meskipun relatif berkurang, tapi tahun 2006 justru semakin meningkat. Sepanjang 2001-2006, ketika pertumbuhan ekonomi menguat dari 3,8 persen menjadi 5,5 persen, pada saat yang sama kemiskinan bertambah menjadi 17,87 persen. Meskipun

pada tahun 2007 dan 2008 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, tapi dengan terjadinya kecenderungan perubahan global seperti *climate change* dan *financial crisis*, sepertinya agenda pengentasan kemiskinan ke depan akan semakin berat.

Masih tingginya tingkat kemiskinan ini menyiratkan akan masih lemahnya kualitas pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan secara adil. Pertumbuhan yang tidak ramah kesejahteraan ini merupakan hasil dari kombinasi pertumbuhan tinggi di sektor padat modal (kapitalistik) dan gelembung di sektor finansial (*bubble economy*). Selain berimplikasi pada masalah kemiskinan, fenomena ini juga sekaligus berimplikasi pada semakin lebarnya kesenjangan struktural di mana sebagian besar penduduk tidak mampu mengambil manfaat dari pertumbuhan yang tinggi. Berbagai program pengentahan kemiskinan telah dilakukan tapi belum mampu mengatasi jumlah penduduk miskin.

Islam memiliki berbagai prinsip terkait dengan kebijakan publik yang dapat dijadikan program pengentasan kemiskinan sekaligus menciptakan lapangan kerja. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat dan mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak dan orang miskin. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin. Zakat, infak dan sedekah (ZIS) menjadikan harta tidak terkonsentrasi hanya pada sekelompok masyarakat tertentu. ZIS juga memastikan bahwa setiap orang akan mendapat jaminan hidup minimum, sehingga memiliki peluang untuk keluar dari kungkungan kemiskinan. Demikianlah Islam mendorong pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Perkembangan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) semakin memperkuat konsep ekonomi Islam secara teoritis dan empiris dalam membantu memecahkan masalah pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan. Mengingat masih sedikitnya dana ZIS yang terserap oleh BAZ dan LAZ, sementara potensi dana yang belum tergalih masih sangat besar, maka tantangan berat bagi BAZ dan LAZ adalah bagaimana agar dana ZIS yang selama ini telah terkumpul dapat efisien dan

efektif dalam pengalokasiannya, khususnya dalam mengentaskan dan memberdayakan masyarakat miskin. Berdasar atas inilah pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah: sejauh mana efektifitas dan efisiensi ZIS sebagai dana sosial mandiri dalam mengentaskan dan memberdayakan masyarakat miskin.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Secara umum penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi dana sosial mandiri ZIS dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dititikberatkan pada mekanisme pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh DPU-DT Cabang Semarang, khususnya melalui program microfinance berbasis pada masyarakat (*Misykat*) melalui program pemberdayaan perempuan miskin dengan berbasis pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Adapun secara rinci tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dana ZIS bagi perempuan miskin, antara lain:
 - a. mengetahui mekanisme pola penerimaan dan distribusi ZIS dari DPU-DT sampai ke asaran, khususnya Program *Misykat*.
 - b. mengidentifikasi *profile group* perempuan miskin penerima ZIS melalui Program *Misykat*.
 - c. mengidentifikasi besarnya *target error* yang terjadi dalam penyaluran ZIS melalui Program *Misykat*.
 - d. mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat efektifitas penyaluran ZIS oleh DPU-DT melalui Program *Misykat*.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efisiensi dana ZIS bagi pengentasan dan pemberdayaan perempuan miskin, antara lain:
 - a. mengetahui besarnya potensi ZIS yang dapat dikumpulkan oleh DPU-DT kota Semarang.
 - b. mengidentifikasi besarnya manfaat yang diperoleh target group penerima ZIS melalui program *Misykat*.

Adapun manfaat-manfaat dari penelitian ini:

1. Secara keilmuan, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengembangan teori ilmu ekonomi islam dan pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan.
2. Secara ekonomis, penelitian ini akan mengembangkan kesimpulan-kesimpulan ilmiah yang bernilai ekonomis dan empiris, yaitu:
 - a. merupakan sumber alternatif dana publik yang mandiri dan berkesinambungan.
 - b. memberikan bekal kemampuan analisis dan problem solving permasalahan-permasalahan ekonomi yang berkembang pesat.

TINJAUAN PUSTAKA

Substansi Kemiskinan dan Kebijakan untuk Mengatasinya

Kemiskinan adalah keadaan penghidupan di mana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar (Sajogyo dan Jiwati Sajogyo, 1983). Hendra Esmara menyatakan bahwa seseorang berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan atas pengeluaran aktual pada sekelompok barang dan jasa esensial yang urutannya sesuai dengan Susenas. The Kian Wie (1978) mendefinisikan kebutuhan dasar sebagai tingkat minimum yang dapat dinikmati oleh seseorang, sehingga kebutuhan dasar tersebut berbeda dari satu daerah dengan daerah lain atau negara dengan negara lainnya. Dalam dataran empirik, beras merupakan standar kemiskinan. Sajogyo dan Jiwati Sajogyo (1983:12) menjadikan perolehan beras bagi setiap penduduk dengan takaran batas minimum 20 kilogram perorang perbulan untuk yang tinggal di pedesaan dan 30 kilogram perorang perbulan untuk yang tinggal di perkotaan. BPS (1994) menyatakan bahwa seseorang akan berada di bawah garis kemiskinan dilihat dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (rumah, sandang dan aneka barang dan jasa). Seseorang akan berada di bawah garis kemiskinan apabila konsumsi perhari kurang dari 2100 kalori. Bank dunia menyatakan bahwa garis batas kemiskinan adalah sebesar US\$ 1 perkapita perhari untuk negara berkembang dan US\$ 2 perkapita untuk

negara maju, yang kemudian dalam program MDGs dipakai acuan kriteria US\$1,5.

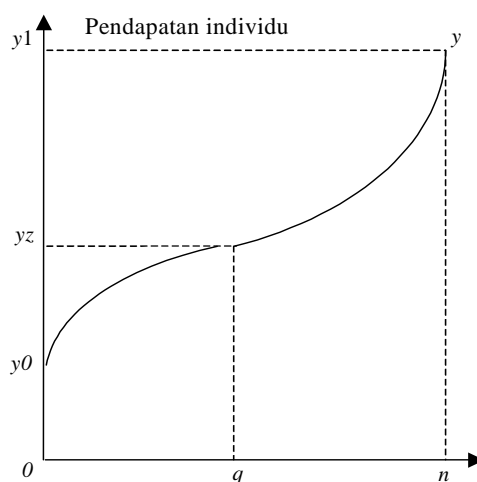
Dalam hubungannya dengan garis kemiskinan, kemiskinan dibagi menjadi dua: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut menunjukkan pada suatu perekonomian yang mempunyai suatu patokan garis kemiskinan yang tetap sepanjang waktu, misalnya dinyatakan dalam konsumsi kalori 2100 perhari (BPS, 1994). Sedangkan konsep kemiskinan relatif menyatakan bahwa garis kemiskinan berubah menurut kondisi perekonomian yang bersangkutan, misalnya penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki 30 persen terendah dari distribusi pendapatan perekonomian tersebut.

Dalam tatanan konsep perkembangan paradigma tentang kemiskinan, terdapat 3 kelompok besar pemikiran dalam mengidentifikasi kemiskinan, yaitu kelompok konservatif, kelompok liberal dan kelompok radikal (Sarman, 1997). Kelompok konservatif memandang kemiskinan masyarakat bermula dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri. Aliran ini menganggap kemiskinan merupakan budaya dari masyarakat, sehingga tetap miskin. Kelompok liberal memandang manusia sebagai makhluk yang baik, tapi akibat pengaruh lingkungan yang diskriminatif dan peluang yang tidak sama menjadikan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi miskin. Kelompok radikal melihat munculnya kemiskinan masyarakat adalah akibat struktur sosial, ekonomi dan politik memang melestarikan kondisi kemiskinan pada sebagian penduduk. Orang menjadi miskin karena dieksploitasi oleh kelompok dominan elit penguasa atau kelas kapitalis.

Kesulitan dalam mengungkapkan fenomena kemiskinan sebagai realitas sosial dan upaya untuk mengentaskannya adalah disebabkan oleh masih belum jelasnya kriteria yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan penduduk. Analisis kemiskinan dan distribusi pendapatan digunakan untuk mencerminkan ketidakadilan dalam masyarakat.

Kemiskinan adalah masalah kurangnya pendapatan seseorang dari tingkat garis kemiskinan yang ada. Gambar 1 menunjukkan konsep kemiskinan, garis kemiskinan, jumlah orang miskin dan distribusi pendapatan. Program pengentasan kemiskinan bertujuan

untuk mengangkat pendapatan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan ($y_0 - y_z$) ke atas garis kemiskinan tersebut ($y_z - y_1$). Garis kemiskinan harus diketahui dengan jelas agar seorang individu dalam suatu periode tertentu dapat mengetahui posisinya agar hidup dengan layak.



Sumber: Nazara, 1997:44

Gambar 1: Fungsi Pendapatan dan Garis Kemiskinan

Berbagai kebijakan yang telah dilakukan melalui berbagai program/proyek dirasakan belum berdampak signifikan. Hasil bantuan program/proyek tidak memberikan luaran yang mampu mengatasi kemiskinan. Hal ini disebabkan (Ana Budi Rahayu, 2007): (1) ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan, (2) paket bantuan tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung, (3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana dan (4) tidak ada kelembagaan di tingkat masyarakat yang melanjutkan program/proyek.

Program kemiskinan yang dilakukan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada dasarnya dibagi dua: bersifat bantuan langsung (*charity*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Di antara program *charity* adalah beras untuk keluarga miskin (Raskin) dan bantuan langsung tunai (BLT). Kedua program *charity* ini akan bermanfaat jika efektif sesuai sasaran yang benar-benar membutuhkan seperti janda tua, jompo, dan cacat yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena fisiknya yang lemah. Program Raskin masih menyisakan beberapa permasalahan (LIPI, 2008): (1)

penyimpangan kilogram beras yang kurang dari seharusnya karena dibagi merata dan dibagi ke warga yang tidak terdata; (2) harga jual yang lebih tinggi akibat transportasi yang sebenarnya sudah dibebankan ke APBN; (3) merusak ke-gairahan petani akibat harga adanya Raskin yang jauh di bawah harga pasar; (4) merusak mental rakyat yang semakin tergantung pada pemerintahnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga memiliki kelemahan: (1) ketidakakuratan data akibat lemahnya metodologi dalam validasi penerima program BLT; (2) distribusi kartu BLT yang tidak merata dan tidak serempak; (3) kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan kantor pos di daerah berkaitan dengan pelaksanaan pencairan BLT; (4) jumlah BLT yang tetap Rp 100.000/bulan, padahal kebutuhan yang semakin meningkat dan inflasi mengakibatkan bantuan tidak banyak berpengaruh bagi kesejahteraan; (5) menimbulkan gejala sosial dan kecemburuan masyarakat; (6) tidak mendidik masyarakat untuk bekerja keras.

Sementara program pemberdayaan masyarakat diberikan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikoordinasikan oleh Menko Kesra. Keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dilakukan melalui program yang bersifat pemberdayaan dengan melibatkan berbagai bidang melalui 22 kementerian/lembaga. Namun demikian, meski telah mengeluarkan anggaran besar, justru malah menimbulkan masalah lain yaitu (LIPI, 2008): (1) diperlukan anggaran yang sangat besar untuk mendukung program yang melibatkan banyak pihak *all grabbing hand*, yang justru kurang koordinasi antar kementerian/lembaga; (2) program ini tidak bertahap dan tidak konsisten dan tidak menitikberatkan pada sektor yang mendesak dan terkait langsung dengan masyarakat, seperti infrastruktur irigasi, jalan atau dan suprastruktur seperti peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan ketrampilan. Kegagalan ketiga program terakhir ini pada dasarnya menunjukkan bahwa program masih belum efektif dan efisien dalam mengatasi kemiskinan.

Efektif merupakan tindakan yang dilakukan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, *do the right thing*. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan cara

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efisien merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara yang benar, *do the thing right*. Efisien merupakan rasio antara input dengan output, yaitu kemampuan untuk mencapai hasil (output) yang diharapkan dengan pengorbanan biaya (input) yang minimum. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila tujuan telah tercapai dengan pengorbanan input terendah. Efisien dapat juga didefinisikan dengan pengorbanan biaya (input) tertentu untuk mendapatkan hasil (output) yang maksimum. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila input yang terbatas mampu menghasilkan output tertinggi. Apabila sudut padangnya adalah sisi pengorbanan (input), maka efisiensi berorientasi pada penghematan atau minimasi biaya. Sedangkan apabila sudut pandangnya sisi hasil (output), maka efisiensi berorientasi pada produktivitas atau maksimasi output.

Tidak efektif dan efisiennya program pengentasan kemiskinan ini pada akhirnya perlu untuk mengubah paradigma pembangunan melalui pemberdayaan (*empowerment*) yang sebenarnya melalui peningkatan kualitas dan peran SDM sebagai subjek pembangunan. Menurut Yunus (2006) kemiskinan disebabkan oleh kegagalan konseptual dan bukan kurangnya kapabilitas di pihak rakyat. Oleh sebab itu, harus ada pembangunan secara konsisten dan menyeluruh agar tepat sasaran dan mencapai hasil yang optimal. Pembangunan yang dilakukan harus menyangkut manusia dan kesejahteraan mereka, yang meliputi kemampuan mereka untuk membentuk hidup mereka sendiri. Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatian pada semua aspek prinsipil dari manusia, mulai dari intelektual, fisik, material sampai manajerial.

Secara konseptual, pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan, yang sering dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat orang tersebut (Suharto, 2005). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan bukan saja dari kesakitan dan kebodohan tapi menyangkut bebas mengemukakan pendapat; (b) menjangkau

sumber-sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan penting dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Dalam memenuhi kebutuhan sosial, terwujud dalam kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Kemiskinan Menurut Islam

Pada dasarnya konsep Islam dalam memandang kemiskinan berada di tengah dua kelompok ekstrim dalam memandang kemiskinan. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah yang memperhatikan tentang kemiskinan, misalnya "*Tahukah kamu (siapakah) orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makanan orang-orang miskin*" (Al-Maa'un:1-3). Demikian pula dalam surat Ad-Dzariyat ayat 19, "*Dan pada harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian*".

Kemiskinan adalah keadaan yang dipilihkan oleh Allah untuk Nabi-Nya Muhammad, sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah: 155-157: "*Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wainna ilaihi*

raaji'uun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk". Ayat ini menjadi ujian bagi yang kekurangan harta (miskin) agar bersabar dan ujian bagi yang kelebihan harta (kaya) agar menggunakan hartanya dengan benar dan saling berbagi dengan mereka yang kekurangan. Terkadang Allah memberikan ujian berupa kebahagiaan atau kekayaan dan pada saat yang lain memberikan ujian berupa kesusahan, seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan (Ibnu Katsir, 2001:1/305). Dengan demikian kaya dan miskin adalah suatu kenyataan hidup yang selalu menyertai manusia di mana saja dan kapan saja.

Persoalan pokok dalam kaitannya dengan kaya dan miskin, bukanlah bagaimana mengatasi dengan menghilangkan kemiskinan dari muka bumi, sehingga yang tertinggal hanya orang-orang kaya. Kemiskinan dan kekayaan adalah ketetapan (*sunnatullah*), sebagaimana setiap manusia juga memiliki kedudukan, pekerjaan dan pendapatan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang melatarbelakanginya. Keadaan yang berbeda-beda inilah yang menjadikan dua kelompok manusia, miskin dan kaya. Islam tidak sama dengan sosialis yang sama rata sama rasa. Islam juga bukan kapitalis, yang kuat lah yang menguasai. Oleh sebab itu, supaya terjadi keadilan, keselarasan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia, zakat, infak dan sedekah (ZIS) menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.

Konsep ZIS dalam Mengatasi Kemiskinan

Secara bahasa zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan manusia dari hak Allah untuk orang fakir. Hak harta tersebut dinamakan zakat karena darinya diharapkan barakah, mensucikan jiwa dan menumbuhkan kebaikan (Sayyid Sabiq, 1995). Zakat adalah kewajiban yang selalu menyertai shalat dan merupakan salah satu rukun Islam yang tidak akan stabil bangunan Islam kecuali dengannya. Zakat adalah kewajiban sosial yang tinggi yang membuat mukmin merasakan ketinggian tujuan Islam berupa kelembutan, rahmat, cinta dan sikap saling membantu (Ibnu Baaz, 2005).

Tabel 1: Jenis Zakat Maal, Nishab, Haul dan Besarnya Yakat yang Harus Dikeluarkan

Jenis wajib zakat	Nishab	Haul	Besaran zakat
Emas	20 dinar (85 gr emas)	1 tahun hijriyah	2,5 % dari total harta yang telah mencapai nishab
Perak	200 dirham (595 gr perak)		
Uang tunai	85 gr emas		
Barang dagangan	85 gr emas		
Barang tambang	85 gr emas		
Kambing	40 ekor	1 tahun hijriyah	1 ekor kambing
Sapi	30 ekor		1 ekor tabi'/tabi'ah
	40 ekor		1 ekor musinah
Onta	5 ekor		1 ekor kambing
Pertanian dan buah-buahan	5 washaq = 652,5 kg (1 wasaq = 60 sha', 1 sha' = 2,175 kg)	Setiap panen	10 % jika diari hujan/sungai 5 % jika diari teknis/irigasi
Harta temuan (karun)	Tidak ada	Saat ditemukan	2,5 % dari total harta yang ditemukan

Sumber: As-Sunnah, 2003.

Zakat adalah konsep istimewa dalam sistem ekonomi Islam. *Pertama*, tidak ada konsep tentang *public fund* yang sebanding dengan zakat dalam agama lain. *Kedua*, zakat memiliki dimensi vertikal yang berkaitan dengan ibadah murni yang berhubungan dengan akhirat (*ukhrowi*) sekaligus dimensi horizontal yang berkaitan dengan ibadah sosial kemanusiaan (*duniawi*). *Ketiga*, zakat memiliki ketentuan terperinci berkenaan dengan subjek, objek, sasaran dan sistem perhitungan. Menurut Mannan (1997:257) zakat memiliki enam prinsip syariat yang mengaturnya, yaitu keyakinan (*iman*), keadilan (*adl*), produktifitas (*nishab*), nalar (*aql*), kemudahan (*yusr*) dan kebebasan.

Banyak ayat Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan tentang kewajiban dan kedudukan zakat dalam Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 110, "Dan tegakkanlah shalat serta tunaikanlah zakat". Kewajiban zakat secara tegas dijelaskan dalam At-Taubah:60, "Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang mengurusnya (*amiliin*), orang-orang (*mu'allaf*) yang dibujuk hatinya, untuk (*memerdekakan*) budak, untuk orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. (*hal demikian*) sebagai ketetapan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Sedangkan dalam As-Sunnah dijelaskan melalui riwayat Bukhori (Fathul Bari I/49) dan Muslim (Syarh Nawawi I/177) dari Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah ber-

sabda "Islam dibangun atas lima dasar: bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, dan berhaji bagi yang mampu". (Sayyid Sabiq, 1995)

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*nafs*) dan zakat harta (*maal*). Zakat jiwa atau disebut dengan zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan bagi setiap umat islam setelah menjalankan ibadah puasa sebanyak sekitar 2,5kg makanan pokok dan diberikan kepada fakir miskin sebelum sholat id. Sedangkan zakat harta merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memiliki harta sesuai dengan jenis dan ukurannya yang telah ditetapkan dalam hukum islam. Secara lengkap jenis zakat maal disajikan dalam Tabel 1.

Dalam Islam zakat adalah landasan pokok bagi sistem jaminan sosial. Sistem zakat menjawab kelemahan atas konsep sistem keserakahan kapitalis dan ketidakbebasan sosialis dalam menjalankan hakikat hidup manusia. Sistem jaminan sosial dalam Islam dimaksudkan untuk menjamin pemerataan kehidupan perekonomian negara, sehingga negara harus menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Menurut Chapra (2001:317) zakat bukan merupakan substitusi dari berbagai model pembiayaan mandiri yang dibuat masyarakat

modern untuk menyediakan perlindungan asuransi sosial bagi pengangguran, kecelakaan, usia lanjut dan kecacatan melalui pengurangan gaji pegawai dan dari kontribusi pemberi kerja. Zakat juga tidak menggantikan komponen pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan atau untuk bantuan di saat terjadi bencana yang telah ditetapkan dalam anggaran. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menopang dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial. Zakat diharapkan mampu mereduksi kemelaratan dan kemiskinan dari masyarakat muslim. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi tekanan pada anggaran pemerintah. Zakat merupakan penopang dan tambahan dalam meringankan beban pemerintah dalam menciptakan keadilan, pemerataan dan pengurangan kemiskinan.

Sebagai pendamping zakat yang wajib bagi masyarakat muslim yang mampu, Islam juga memiliki sumber dana sosial mandiri yang tidak kalah pentingnya, yaitu infak dan sedekah. Perbedaan mendasar antara zakat dengan infak dan sedekah adalah pada sisi beban kewajiban dan peruntukannya. Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta kena zakat yang telah mencapai *nishab* dan *haul* dengan ukuran pembayaran yang telah ditetapkan dan delapan kelompok sasaran (*asnaf*). Sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah, tidak terikat *nishab*, *haul* dan *asnaf*. Pendefinisian infak biasanya lebih umum dibandingkan sedekah. Infak biasanya digunakan untuk kepentingan umum seperti masjid, pendidikan dan lain-lain, sementara sedekah biasanya untuk manusianya (As-Sunnah, 2003). Infak dan sedekah dapat diberikan kapanpun, untuk siapapun yang memerlukan dan tidak tergantung jumlah kekayaan yang dimiliki dan besaran nominal atau jumlah yang harus disalurkan. Ketika banyak masyarakat miskin dan membutuhkan, misalnya bencana alam, maka infak dan sedekah merupakan potensi besar untuk memecahkan masalah

kemiskinan, karena tidak terikat besarnya harta yang dimiliki dan haul.

Efektifitas dan Efisiensi ZIS dalam Mengatasi Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan FGT dalam mengentaskan kemiskinan, maka zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen yang efektif untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah kemiskinan. *Pertama*, potensi ZIS di Indonesia masih sangat besar. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang melimpah potensi ZIS akan selalu ada. *Kedua*, semakin banyaknya lembaga filantropi Islam yang telah mendapat legalisasi yuridis dari pemerintah dalam mengelola dan menyalurkan dana umat khususnya ZIS. *Ketiga*, melalui tempat-tempat ibadah, pengajian-pengajian dan perkumpulan masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, maka *perfect targeting* atas penduduk miskin akan lebih mudah teridentifikasi. *Keempat*, secara makro ZIS memiliki dampak multiplier luas dan dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Pada tahun 1999, di Malaysia untuk negara bagian Kuala Lumpur dengan jumlah penduduk muslim sekitar 650.000 jiwa, dana zakat yang terkumpul sebesar 105,6 milyar rupiah atau 162.000 rupiah perkapita. Di Singapura dengan jumlah penduduk muslim 450.000 jiwa dana zakat yang terkumpul sebesar 71,5 milyar rupiah atau 159.000 rupiah perkapita. Sementara itu Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia di mana lebih dari 191 juta jiwa muslimin, ternyata hanya terkumpul dana zakat sebesar 216,9 milyar rupiah atau 1.136 rupiah perkapita (Dialog Suplemen Republika, 27 Agustus 1999). Dengan asumsi tingkat kehidupan dan pendapatan relatif sama atau dengan angka konservatif target zakat di Indonesia adalah 162.000 rupiah perkapita, maka besarnya dana zakat yang terkumpul seharusnya 30,942 trilyun rupiah. Jumlah ini melebihi dana yang disiapkan pemerintah untuk program IDT dan JPS (Muhammad dan Ridwan, 2005:102). Permasalahannya Indonesia belum mampu menarik potensi zakat yang sedemikian besarnya. Selain memiliki tingkat pendapatan, standar tingkat kehidupan yang berbeda dengan Indonesia, Malaysia sejak 1991 telah memiliki

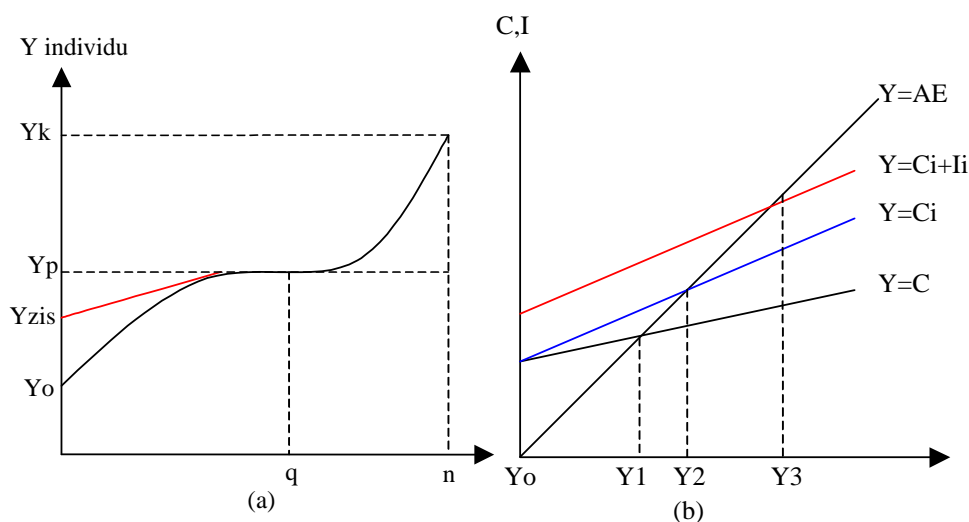
Maklumat Agihan Zakat (MAZ) yang secara khusus memiliki wewenang penagihan zakat sebagaimana pemungutan pajak.

Pendekatan yang lebih realitis adalah dengan menggunakan data tabungan dan deposito dalam bank. Selain merupakan salah satu jenis harta yang terkena zakat (zakat maal 2,5 %), tabungan dan deposito juga merupakan *idle fund* yang mudah teridentifikasi, apalagi dalam bank terdapat prinsip *know your customers*. Pada tahun 2005, posisi tabungan dan deposito perorangan berjumlah 482,36 trilyun rupiah. Jika diasumsikan dari dana tabungan dan deposito tersebut yang 20 persen merupakan dana *muzakki* (terkena kewajiban zakat), maka besarnya dana zakat adalah sebesar 2,41 trilyun (2,5 % x 96,472 trilyun). Dana zakat ini cukup untuk mendanai 120.500 kelompok masyarakat dalam bentuk *revolving block grant* program IDT. Tentunya potensi ini dapat diraih jika didukung dengan payung hukum melalui regulasi dan institusi sejenis MAZ di Malaysia yang diberi wewenang untuk secara otomatis memotong dana tabungan masyarakat muslim yang telah mencapai *nishab*. Potensi zakat akan semakin besar jika institusi tersebut diberi wewenang lebih luas pada berbagai jenis zakat lainnya. Apalagi jika potensi dari infak dan sedekah mampu dikumpulkan dan dikelola dengan baik oleh lembaga pengelola ZIS.

Dalam kenyataannya masih banyak dana ZIS yang langsung disalurkan kepada masyarakat.

Zakat juga akan semakin efektif dalam mengentaskan kemiskinan setelah didukung regulasi Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang ini, pemerintah telah membuka kran semakin mudahnya penyaluran zakat. Pemerintah telah memberikan legalisasi kepada Badan Amil Zakat (BAZ) dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tersebar di pelosok wilayah Indonesia, seperti LAZ Muhammadiyah, LAZ Nahdatul Ulama, PKPU, Rumah Zakat Indonesia. Keberhasilan pengelolaan zakat dan penyalurannya akan sangat dipengaruhi kesungguhan LAZ-LAZ yang ada untuk menjelaskan tentang makna, hukum, dan peranan zakat yang disertai dengan transparansi dalam pengelolaan zakat itu sendiri.

Zakat sebagai ibadah istimewa memiliki target penerima tertentu. Sistem target tertentu inilah yang menjadikan zakat efektif dalam mengentaskan kemiskinan, karena lebih tepat sasaran. Sistem persaudaraan (*ukhuwah islamiyah*) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia akan memudahkan penyaluran zakat melalui *perfect targeting*. Melalui kelompok-kelompok pengajian di mushola-mushola dan masjid-masjid, informasi tentang penduduk fakir dan miskin akan lebih mudah teridentifikasi.



Sumber: Arif Pujiyono, 2007 (dengan modifikasi seperlunya)
Gambar 3: Efektifitas ZIS dalam mengatasi Kemiskinan dan Efisiensi ZIS dalam meningkatkan Pendapatan Nasional

Golongan fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki harta benda untuk melangsungkan kehidupannya. Sebagaimana tersirat dalam surat Al-Hasyr yang berhijrah dengan meninggalkan keluarga, harta dan benda, maka pengungsi baik akibat bencana alam atau keamanan memiliki posisi yang sama dengan orang fakir. Mereka banyak tersebar di berbagai kamp pengungsian tsunami, gempa, banjir dan tanah longsor. Sementara golongan miskin mencakup semua orang yang lemah dan tidak berdaya baik karena sakit atau usia lanjut dan tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk menjamin dirinya dan keluarganya. Keberadaan orang miskin yang masih banyak di sekeliling kita merupakan tanggung jawab moral dan sosial bagi *muzakki* di lingkungannya. Rasulullah bersabda “*Tidaklah beriman seseorang yang tetangganya kelaparan, sementara dia memiliki kelebihan makanan*”.

Gambar 3 (a) di atas menjelaskan tentang dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan yang lebih jelas dan fokus melalui *perfect targeting*. Dengan dana zakat yang tersedia memang belum bisa menurunkan garis kemiskinan y_c dan jumlah penduduk miskin (q), tapi dapat mengurangi tingkat keparahan kemiskinan dengan naiknya Y_0 menjadi Y_{zis} . Berbeda dengan dana pengentasan kemiskinan yang tidak *perfect targeting*, karena masih dimungkinkan terjadinya kebocoran dan salah sasaran. Meskipun dana tersebut dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, tapi rentan terhadap meningkatnya jurang kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Secara empiris dapat dibuktikan melalui besaran rasio gini maupun kurva lorenz yang semakin lebar. Apalagi jika diikuti dengan naiknya pendapatan sebagian yang kaya dari kelompok miskin menjadi di atas garis kemiskinan, maka sudah semestinya ukuran garis kemiskinan juga akan naik. Artinya, dana tersebut secara keseluruhan persentase penduduk, tetap saja akan mengelompokkan pada jumlah penduduk miskin yang relatif sama jumlahnya, karena ukuran garis kemiskinan juga ikut naik. Berbeda dengan zakat sebagai program pengentasan kemiskinan. Dalam jangka pendek zakat dapat mengeliminasi tingkat keparahan kemiskinan. Dalam jangka panjang atau sesuai dengan potensi zakat yang terkumpul, kemiskinan akan dapat

berkurang dan ketimpangan akan semakin rendah.

Apabila ditinjau dari penggunaan dan dampaknya, zakat juga efisien dalam mengatasi masalah kemiskinan. Meskipun lebih bersifat konsumtif, tapi jika ditinjau secara makroekonomi zakat memiliki dampak multiplier yang potensial bagi peningkatan pendapatan nasional. Adanya zakat dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat miskin. Tambahan pendapatan dari zakat digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa pokok, sehingga meningkatkan permintaan agregat terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok tersebut. Meningkatnya permintaan agregat inilah multiplier zakat dalam menarik tabungan, investasi, arus modal, penciptaan tenaga kerja dan pertumbuhan.

Konsep zakat dalam islam adalah menumbuhkan. Sayyid Sabiq (1995:246) menjelaskan bahwa penamaan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk barokah, membersihkan jiwa dan menumbuhkan kebaikan. “*Ambillah dari harta-harta mereka shodaqoh (zakat), karena membersihkan dan mensucikan*” (At-Taubah: 103). Dengan zakat akan menumbuhkan kasih sayang antara yang kaya dengan yang miskin, menumbuhkan akhlak dermawan dan menjauhkan/mebersihkan diri dari sifat kikir. Dalam konsep teori konsumsi, ZIS akan meningkatkan daya beli orang miskin. Bahkan secara makroekonomi dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Dalam pendekatan model keseimbangan pendapatan nasional, efisiensi zakat, infak dan shadaqah dapat dijelaskan melalui model. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan pendapatan nasional pada Gambar 3 (b), di jika dana ZIS diberikan ke mustahik masyarakat miskin, maka dengan naiknya konsumsi C_i menjadikan Y naik dari Y_1 ke Y_2 . Bahkan jika ZIS digunakan untuk modal produktif, maka pendapatan akan meningkat lagi menjadi Y_3 .

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menyebar kuesioner terstruktur kepada perempuan miskin penerima dana ZIS dari Program Misykat DPU-DT Semarang. Data primer juga diperoleh melalui *indept interview*

dengan pengelola DPU-DT khususnya untuk Program Misykat. Data sekunder diperoleh dari berbagai publikasi yang terkait dengan penelitian. Data jumlah penduduk miskin diperoleh dari BPS, BKKBN dan Dinas Sosial.

Populasi dan Sampel

Studi penelitian ini merupakan studi deskriptif analitis. Penentuan lokasi pengambilan sampel adalah kota Semarang dengan berbagai pertimbangan. Pertama, jumlah penduduk muslim di kota Semarang adalah 1.162.988 atau 83,7 persen dari total penduduk (BPS, 2005). Kedua, menurut data BPS (2005) jumlah pondok pesantren adalah 106 (terbanyak kedua setelah Kabupaten Kendal) dengan jumlah kyai 516 (kedua setelah Kabupaten Demak). Ketiga, jumlah jemaah haji rata-rata selama periode 2001-2005 adalah terbanyak kedua setelah Kabupaten Jepara, yaitu 1436 jemaah (BPS, 2006). Keempat, jumlah lembaga amal zakat tingkat nasional yang memiliki cabang di Kota Semarang dan Yogyakarta sebanyak 5, yaitu Dompot Dhuafa', Rumah Zakat, Dompot Peduli Umat Darut Tauhid, Dompot Sosial Ummul Quro', Laz Muhammadiyah, belum termasuk yang lokal. Kelima, jumlah rekening tabungan perseorangan adalah 35.074 ribu atau 81,1 persen dari total rekening tabungan perseorangan di Jawa Tengah (BI, 2005). Populasi penelitian ini adalah semua perempuan miskin penerima dana ZIS Program Misykat DPU DT Semarang. Karena populasinya yang hanya 36 binaan perempuan miskin, maka semuanya dijadikan responden untuk penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan Gay dan Diehl (1996) dalam Mudrajad Kuncoro (2003), jumlah sampel minimal yang dapat diterima tergantung dari jenis studi yang dilakukan. Dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data atau informasi dari informan kunci (*key information*) sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan, yakni atas dasar penilaian bahwa para informan mengetahui secara baik permasalahan yang sedang diteliti dan juga mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti: umur, tingkat kedewasaan, tingkat kecerdasan, tempat tinggal informan saat penelitian, pengalaman dalam menjalankan program dan lain-lain.

TEKNIK PENGUKURAN DATA

Uji Validitas Data

Penelitian ini melakukan uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji Validitas dilakukan dengan menghitung nilai *Keiser-Meyer-Olkin Measure Sampling Adequacy (KMO-MSA)*. Jika *KMO-MSA* lebih besar dari 0,52 berarti kuesioner terbut valid.

Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu kuesioner reliabel atau handal. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan mengukur nilai *Cronbach Alpha*, dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,63.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian akan dilakukan metodologi deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama, akan dilakukan studi kepustakaan untuk melihat dan mempejari konsep kemiskinan ditinjau menurut ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dan bagaimana solusinya. Dalam hal ini diperlukan kajian lebih mendalam mengenai implementasi Al Qur'an dan Al-Hadits beserta penafsirannya dan UU tentang Pengelolaan Zakat dan implementasinya. Studi pustaka juga dilakukan untuk mengolah dan menganalisis data-data sekunder yang terkait dengan studi ini.

Tahap kedua, untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi ZIS dalam memberdayakan masyarakat miskin, akan dilakukan analisis deskriptif yang bersifat eksploratif (Supranto 2003) yang bertujuan agar penelitian dapat menggambarkan keadaan perempuan miskin penerima Program Misykat DPU-DT kota Semarang. Studi lapangan ini dilakukan khususnya untuk melihat sejauh mana konsep *perfect targeting* dari ZIS benar-benar diimplementasikan dan dampaknya bagi pemberdayaan. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk menggambarkan pola-pola yang

konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna (Mudrajad, 2004).

Tahap ketiga, hasil studi pustaka dan hasil survey lapangan selanjutnya akan diolah dan dianalisis guna menyusun alternatif kebijakan keuangan publik yang dinilai *feasible* untuk diimplementasikan pada masa mendatang.

Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu analisis data yang berbentuk angka (nilai). Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan analisis uji beda Uji Statistik Pangkat Tanda Wilcoxon (Wilcoxon Sign Rank Test).

Menurut Supranto (2003), uji statistik pangkat tanda wilcoxon termasuk jenis statistik nonparametrik, dipakai apabila peneliti tidak mengetahui karakteristik kelompok item yang menjadi sumber sampelnya. Metode ini dapat diterapkan terhadap data yang diukur secara ordinal dan dalam kasus tertentu, dengan skala nominal. Pengujian non parametrik bermanfaat untuk digunakan apabila sampelnya kecil dan lebih mudah dihitung daripada metode parametrik. Di dalam statistik nonparametrik, kesimpulan dapat ditarik tanpa memperhatikan bentuk distribusi populasi (statistik yang bebas distribusi).

Uji pangkat tanda Wilcoxon digunakan sebagai uji beda dengan alasan data yang diteliti berasal dari sejumlah responden yang sama dan berkaitan dengan periode waktu pengamatan yang berbeda (sebelum dan sesudah pinjaman dan program Misykat). Di antara periode pengamatan tersebut telah dilakukan pinjaman dana yaitu pemberian pinjaman modal kerja disertai pendampingan, intervensi pelatihan dan konsultasi usaha.

Penelitian ini akan menguji apakah ada perbedaan nyata (ada peningkatan) pada variabel-variabel yang diamati pada waktu awal periode pengamatan dan pada akhir periode waktu pengamatan.

Adapun variabel yang diamati dan di uji adalah pengeluaran untuk biaya konsumsi, biaya pendidikan dan jumlah simpanan pada tataran rumah tangga, jumlah pendapatan usaha dan keuntungan pada tataran usaha. Setelah uji pangkat tanda *Wilcoxon* dilakukan akan muncul

nilai Z dan nilai probabilita p. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut.

H0 : Tidak ada beda dan peningkatan variabel yang diuji antara sebelum dan sesudah pendampingan Misykat.

H1 : Ada beda beda dan peningkatan variabel yang diuji antara sebelum dan sesudah pendampingan Misykat.

Jika probabilitas (p) > 0,05 maka hipotesis Ho diterima, Jika probabilitas (p) ≤ 0,05 maka H1 ditolak (Sugiyono, 2004).

Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis data variabel kemandirian menggunakan analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif yang diangkakan (skoring) misalnya terdapat dalam skala pengukuran, seperti suatu pernyataan/pertanyaan yang memerlukan alternatif jawaban, sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju dimana masing-masing: sangat setuju diberi angka 5, setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1 (Sugiyono, 2004).

Variabel kemandirian diukur dengan pendekatan variabel kepercayaan diri, variabel keterampilan, variabel keilmuan/pendidikan dan variabel keyakinan sukses. Data variabel tersebut bersifat kualitatif dalam bentuk jawaban 'sangat tidak meningkat', 'tidak meningkat', 'cukup meningkat', 'meningkat' dan 'sangat meningkat'. Oleh sebab itu, dilakukan uji untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara banyak yang diamati (*observed*) dari obyek atau jawaban yang masuk dalam masing-masing kategori dengan banyak yang diharapkan (*expected*) berdasarkan hipotesis nol.

Menurut Sidney Siegel (1990) dalam Budiono (2005) digunakan uji Chi-Square dengan menggunakan teknik tipe *goodness of fit*. Setelah uji Chi-Square dilakukan akan muncul nilai Chi-Square dan nilai probabilitas p. dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Ho : tidak ada hubungan antara peningkatan variabel yang diuji

H1 : ada hubungan antara peningkatan variabel yang diuji

Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima sedangkan jika probabilitas $\leq 0,05$ maka H_1 ditolak (Sugiyono, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Semarang

Kota Semarang secara geografis terletak di wilayah pantura pulau Jawa, di mana sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah selatan dengan kabupaten Semarang, sebelah timur dengan kabupaten Demak dan sebelah barat dengan kabupaten Kendal. Kota Semarang memiliki wilayah dataran rendah dan dataran tinggi (BPS, 2007).

Sebagai ibu kota propinsi Jawa Tengah, maka kota Semarang merupakan pusat berbagai kegiatan seperti pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan industri. Konsekuensi logis sebagai pusat kegiatan, menjadikan kota Semarang sebagai salah satu pilihan utama masyarakat di Jawa Tengah untuk memenuhi harapan dan cita-cita mereka. Akibatnya, berbagai permasalahan pembangunan, termasuk kemiskinan, menjadi semakin kompleks dan rumit akibat pengaruh industrialisasi dan urbanisasi serta permasalahan perkotaan lainnya.

Gambaran Umum Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT)

Sejarah DPU-DT berawal dari rapat pengurus Yayasan Daarut Tauhid pada tanggal 16 Juni 1999, yang menyadari bahwa keadaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh pesantren Daarut Tauhid pada saat itu belum optimal dan timbulnya pemikiran untuk juga mengoptimalkan potensi jamaah pesantren Daarut Tauhid. Atas dasar alasan tersebut diputuskan bahwa perlu ada peningkatan kinerja badan pengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS) secara profesional, amanah dan jujur, berlandaskan pada ukhawah islamiyah. Selain itu diperlukan juga strategi-strategi baru yang efektif dan efisien dalam mengelola dana yang dihimpun dari ZIS, sehingga pada gilirannya dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi masyarakat. Berangkat dari alasan inilah, Yayasan Daarut Tauhid memutuskan untuk mendirikan Dompot Peduli Ummat.

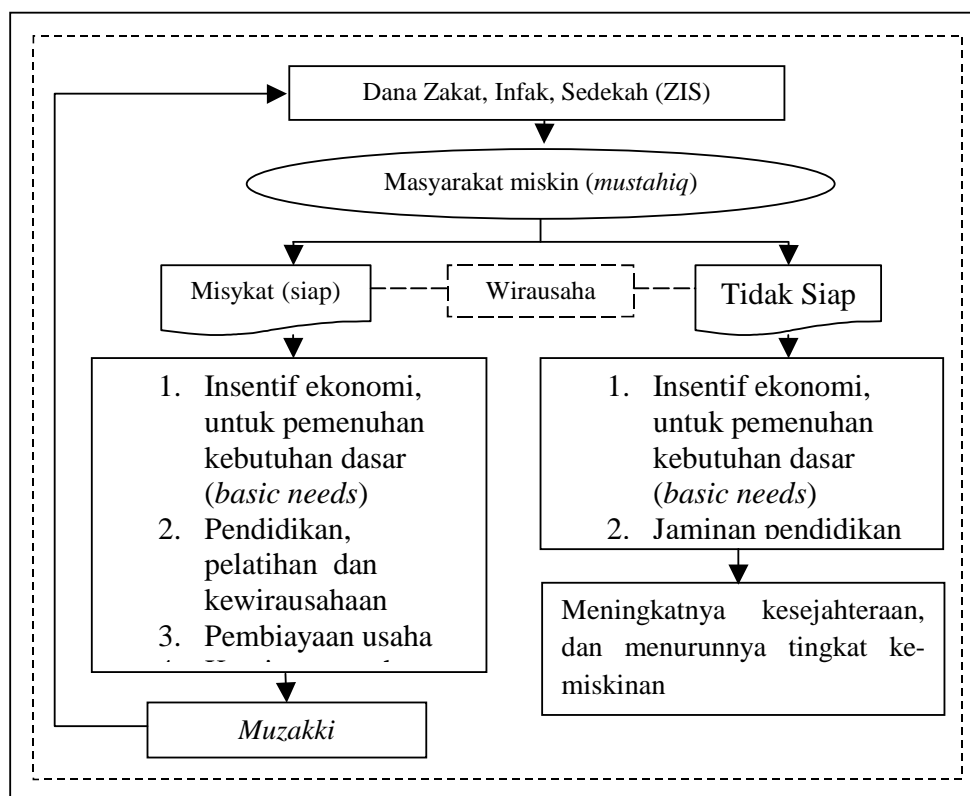
DPU DT secara efektif menjalankan aktifitasnya pada bulan Juni 2000, dengan berbasiskan pada database, di mana setiap donatur memiliki nomor dan kartu anggota, sehingga kepedulian dan komitmen donatur dapat terukur. Secara legal formal, DPU-DT dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002. Pada tahun 2004 DPU DT berhasil menjadi LAZNAS pada tanggal 13 Oktober 2004 sesuai SK Menteri Agama No. 410 tahun 2004.

DPU DT secara struktural berada di bawah Yayasan Daarut Tauhid dan secara otomatis mengemban peran yang sama dengan misi Daarut Tauhid yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dakwah, pengabdian kepada masyarakat saerta usaha-usaha kemandirian yang berlandaskan dengan nilai-nilai islam. Berdasarkan hal itu, DPU-DT memiliki visi menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. Sedangkan misi yang diemban oleh DPU-DT yaitu mengoptimalkan potensi ummat melalui ZISWA untuk memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.

Analisis Efektifitas Program Miskat Dalam Memberdayakan Perempuan Miskin

Mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana program misykat DPU-DT

Pada dasarnya mekanisme Program Misykat dananya dikumpulkan dari individu, perusahaan, pemerintah, lembaga atau institusi nonpemerintah. Sedangkan mekanisme penerimaannya dapat berbentuk kotak amal, rekening atau dijemput ke tempat asal. Penerimaan tersebut dapat secara umum dari ZIS atau secara khusus memang dihimpun untuk Program Misykat, sehingga sifatnya ada yang rutin khususnya zakat dan tidak rutin untuk infak dan sedekah atau dana kemanusiaan. Adapun penyaluran Program Misykat merupakan salah satu alternatif penyaluran dana yang sifatnya memberikan bantuan sekaligus mendidik masyarakat miskin agar mandiri. Secara sederhana program Misykat di DPU-DT adalah sebagaimana pada Gambar 4.



Sumber: Sofyan, 2006, dengan modifikasi seperlunya

Gambar 4: Model Pengumpulan dan Penyaluran dana ZIS DPU DT melalui Program Pemberdayaan Perempuan Miskin Misykat

Berdasarkan atas Gambar 4 dana akan bergulir, sehingga pemberdayaan dapat berkesinambungan serta *coverage* lebih luas dan terjadi *asset reform*. Dana dari muzaki/orang kaya disampaikan kepada LAZ DPU-DT lalu oleh DPU DT disalurkan kepada pengusaha mikro/binaan (anggota Misykat) melalui mekanisme *microfinance*. Melalui *microfinance* dapat terjadi penyebaran aset dan sumber daya modal, yang semula hanya terkonsentrasi di muzaki mulai menyebar lebih luas lagi kepada masyarakat.

Profil Responden

Responden berasal dari 36 binaan DPU DT Semarang berumur usia produktif antara 25 – 55 tahun dengan status 32 orang bersuami dan 4 orang janda. Profil pekerjaan utama (usaha) responden adalah mayoritas (83,33%) adalah pedagang, sisanya di sektor jasa (8,33%), peternakan (5,56%) dan sisanya (2,77%) adalah petani. Alasan utama mereka melakukan pekerjaan dan mendapat bantuan Program misykat adalah untuk meningkatkan pendapatan

keluarga (69,44%). Dari 36 responden, 31 orang (86,11%) memiliki tanggungan keluarga 2-3 orang dan 5 orang (33,69%) memiliki tanggungan keluarga 3-4 orang. Rata-rata pengeluaran (konsumsi) keluarga responden adalah Rp 946.418 dengan tingkat pendapatan rata-rata Rp. 1.125.405. Berdasarkan usaha, rata-rata modal investasi adalah Rp 1.869.810, modal bahan baku Rp 1.341.702, keuntungan Rp 497.793 dan tabungan Rp 6.581.

Analisis Target Error Program Misykat

Kelebihan ZIS sebagai instrumen fiskal dalam mengentaskan kemiskinan adalah ketepatan sasaran (*perfect targeting*). *Target error* dalam peyaluran dana ZIS terjadi apabila distribusi ZIS tidak sesuai dengan kriteria mustahik. Dalam hal ini penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan ekonomi seharusnya adalah masyarakat miskin berdasarkan kriteria lembaga amil zakat atau kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) atau kriteria bank dunia. DPU-DT tidak memiliki batas garis kemiskinan dalam bentuk satuan tertentu, baik kalori,

kebutuhan dasar maupun nilai nominal uang, sehingga dalam penelitian ini digunakan batas garis kemiskinan BPS dan Bank Dunia. Menurut BPS kemiskinan diukur berdasar garis kemiskinan per bulan Maret pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 166.750,-. Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan garis kemiskinan internasional yang setara dengan US\$ 1 atau US\$ 2.

Berdasarkan data lapangan ternyata masih banyak yang salah sasaran. Apabila garis kemiskinan yang digunakan adalah berdasarkan kriteria BPS yaitu sebesar Rp 166.750,- maka sebagian besar responden yaitu sebesar 91,67% responden tidak tergolong masyarakat miskin atau mustahik. Dengan kata lain hanya 8,33% responden saja yang tergolong miskin atau mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa *target error* dari program ZIS masih sangat besar, karena 91,67 % telah salah sasaran.

Jumlah responden yang tergolong miskin atau mustahik akan berkurang apabila menggunakan batas kemiskinan berdasarkan kriteria Bank Dunia sebesar US\$ 1 per hari atau sebesar Rp 312.000,- (dengan asumsi kurs dolar terhadap rupiah sebesar Rp 10.400,-) di mana sebesar 44,44% responden adalah tergolong masyarakat miskin atau mustahik dan sisanya yaitu sebesar 55,56% bukan tergolong masyarakat miskin atau mustahik. Jika menggunakan kriteria Bank Dunia, maka hanya *target error* penyaluran ZIS melalui Program Misykat DPU-DT akan lebih sedikit atau lebih tepat sasaran (44,44%).

Permasalahan *target error* ini terjadi karena selama ini data kemiskinan hanya menggunakan kriteria BPS dan Bank Dunia, itupun yang \$ 1 per hari bukan yang \$2 per hari. Oleh sebab itu, perlu dilakukan reformulasi ulang tentang kriteria kemiskinan menurut Islam. Apalagi dengan semakin naiknya kebutuhan pokok, maka kriteria kemiskinan BPS dan Bank Dunia sudah tidak relevan lagi, karena terlalu rendah. Penggunaan kriteria BPS dan Bank Dunia yang \$1 ternyata memang memiliki nuansa politis, apalagi jika kriteria kemiskinan menggunakan \$2, maka setengah penduduk di Indonesia adalah miskin. Suatu angka yang secara politis tidak menguntungkan bagi pemimpin bangsa di mata rakyat dan dunia.

Analisis Efisiensi Program Misykat DPU-DT

Analisis Potensi ZIS Semarang

Dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan, tersedianya dana yang memadai merupakan prasyarat mutlak keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Dalam rangka menggali sumber dana mandiri secara optimal, mengidentifikasi potensi sumber dana mandiri menjadi sangat penting. Banyak cara telah dilakukan untuk mencoba mengidentifikasi potensi ZIS dengan segala metode dan asumsi yang mendasarinya.

Berdasarkan versi DPU-DT, besarnya potensi zakat dihitung dengan menggunakan asumsi 30% dari total penduduk muslim kota Semarang adalah mustahik dan masing-masing akan mengeluarkan zakat sebesar Rp 1.000.000, sehingga potensi zakat yang bisa diperoleh adalah sebesar Rp 232.526.400.000. Potensi akan semakin besar jika semua jenis zakat dimasukkan ke dalam perhitungan baik berupa emas, zakat fitrah, pertanian, temuan dan perniagaan.

Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Berdasarkan atas hasil korelasi menggunakan *Anti-image correlation factor* didapatkan bahwa nilai korelasi *Anti-image* untuk variabel pinjaman, keuntungan usaha, dan jumlah simpanan semuanya adalah valid dengan nilai di atas 0,05. Hasil analisis *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)* adalah 0,57. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen masing-masing variabel adalah valid, karena nilai KMO telah melebihi dari 0,5.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu kuesioner reliabel atau handal. Uji Reliabilitas dilakukan dengan mengukur nilai Cronbach Alpha, dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* >0,60. Pengujian reliabilitas instrumen penelitian mencakup 14 item, yaitu 8 item pinjaman modal Misykat, 4 item pendapatan usaha dan 2 item jumlah simpanan. Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap 14 item yang di uji menunjukkan Reliabilitas Statistik *Cronbach's Alpha* sebesar 0,712. Hal ini berarti nilai koefisien reliabilitas lebih dari 0,60, sehingga hasil dari pengujian dapat dikatakan reliabel.

Uji Normalitas Data

Untuk uji normalitas data digunakan uji *Kolmogrove Smirnov*. Uji ini digunakan untuk mengetahui distribusi suatu variabel independen adalah sama berdasarkan variabel *group*-nya. Setelah diketahui bahwa hasil uji normalitas menunjukkan bahwa distribusi frekuensi data ternyata tidak normal maka alat uji statistik yang dipakai adalah uji statistik non-parametrik. Berdasarkan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*, dapat disimpulkan bahwa dari 6 variabel yang di uji tidak semua berdistribusi normal. Suatu variabel dikatakan berdistribusi normal jika probabilitas (Sig.) $\geq 0,05$ (Syahri Alhusin, 2003). Oleh karena data tidak semua berdistribusi normal, maka alat uji statistik yang dipakai adalah uji statistik non-parametrik (Uji dua sampel yang berkaitan/ uji Wilcoxon).

Analisis Deskriptif Kualitatif

Berdasarkan hasil empiris menunjukkan mayoritas responden merasakan terbantu dengan adanya program pinjaman bergulir Misykat, apalagi model pinjamannya bergulir, tanpa agunan dan bukan dengan sistem bunga yang memberatkan karena waktu pengembalian rutin dan tetap tanpa melihat hasil usaha. Penerima Program Misykat tahu bahwa mereka mendapat dana bergulir, mekanisme memperolehnya mudah, dapat membantu pengembangan usaha.

Variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung tingkat kemandirian responden diantaranya variabel kepercayaan diri, variabel keterampilan, variabel keilmuan (pendidikan keagamaan dan manajemen usaha) dan variabel keyakinan kesuksesan usaha. Variabel-variabel kemandirian di analisis menggunakan analisis deskriptif berdasarkan distribusi frekuensi sampel.

Berdasarkan studi lapangan, berkaitan dengan tingkat keberdayaan perempuan miskin menunjukkan bahwa Program Misykat dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam mengelola usaha, meningkatkan keterampilan dalam mengelola usaha, meningkatkan ilmu (agama dan manajemen usaha) dengan menonjolkan paradigma kebersamaan, meningkatkan keyakinan usaha untuk meraih keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya, sehingga semakin semangat untuk mengembangkan usahanya dan membuka usaha baru

bagi yang ingin mempunyai pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk mendukung program dapat berjalan baik, maka DPU-DT memberikan pendampingan usaha bagi binaan.

Berdasarkan pemaparan keempat variabel di atas yaitu variabel kepercayaan diri, variabel keterampilan usaha, variabel keilmuan (keagamaan dan manajemen usaha) dan variabel keyakinan akan sukses maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pendampingan oleh Misykat DPU-DT dapat membantu anggota Misykat lebih berdaya dan mandiri dalam menjalankan usahanya dan menambah penghasilan ekonomi keluarganya, sehingga diharapkan setelah keluar atau mengikuti pendampingan Misykat binaan sudah benar-benar mandiri dalam permodalan dan mengelola usahanya.

Analisis Uji Beda

Metode uji statistik nonparametrik merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan kesahihan dan validitas data meskipun hanya berdasar asumsi-asumsi umum. Diperlukan uji statistik non-parametrik mengingat bahwa suatu pengujian populasi seringkali dihadapkan pada suatu uji yang harus dilakukan tanpa ketergantungan asumsi-asumsi yang kaku karena bersifat umum.

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji pangkat tanda wilcoxon untuk menghitung kemaknaan statistik pendapatan usaha sebelum dan sesudah penjaminan modal kerja produktif Misykat yang disertai pendampingan usaha ditampilkan menunjukkan terjadi peningkatan pendapatan usaha (laba kotor) per bulan dari rata-rata Rp. 1.543.882 sebelum adanya pemberian modal usaha Misykat, menjadi Rp. 1.870.567 setelah adanya pemberian modal Misykat atau ada kenaikan sebesar 21,16 persen. Berdasarkan uji pangkat tanda wilcoxon didapat nilai $-p$ sebesar 0,001. Hal ini berarti menunjukkan probabilitas kurang dari 0,05 yang berarti juga bahwa H_0 ditolak. H_0 ditolak berarti menunjukkan ada perbedaan sangat nyata pendapatan antara sebelum dan sesudah adanya pinjaman modal kerja bergulir Misykat yang disertai dengan pendampingan usaha.

Hasil studi empiris juga menunjukkan adanya peningkatan keuntungan usaha per

bulan dari rata-rata sebesar Rp. 515.226 tiap keluarga sebelum Program Misykat menjadi rata-rata Rp 554.278 setelah Program Misykat atau meningkat sebesar 7,58 persen. Berdasarkan uji pangkat tanda wilcoxon didapatkan nilai $-p$ sebesar 0,029. Nilai $-p$ sebesar 0,029 berarti menunjukkan probabilitas kurang dari 0,05 yang berarti juga bahwa H_0 ditolak. H_0 ditolak berarti menunjukkan ada perbedaan keuntungan usaha antara sebelum dan sesudah pinjaman dana bergulir Misykat.

Adapun dampak Program Misykat terhadap simpanan, menunjukkan telah terjadi peningkatan jumlah simpanan keluarga per bulan dari rata-rata sebesar Rp. 6.778 tiap keluarga sebelum Program Misykat menjadi rata-rata sebesar Rp. 39.343 setelah Program Misykat atau mengalami peningkatan sebesar 480 persen. Berdasarkan atas pengujian pangkat tanda wilcoxon diperoleh nilai $-p$ sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan probabilitas kurang dari 0,05 yang berarti juga bahwa H_0 ditolak. Penolakan H_0 menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata biaya konsumsi sebelum dan sesudah pinjaman dana bergulir Misykat. Peningkatan secara signifikan jumlah simpanan rata-rata penerima Program Misykat sebesar 480 persen lebih dipengaruhi adanya kewajiban untuk menyisihkan sebagian keuntungannya untuk ditabung sebagai antisipasi pengeluaran keluarga yang tidak terduga ke depannya. Program Misykat melalui pendampingan rutin memberikan pemahaman kepada binaan akan pentingnya simpanan/tabungan terlebih untuk mengatasi gejala perekonomian yang tidak menentu dan untuk mengantisipasi biaya pendidikan keluarga yang sewaktu-waktu bisa berubah. Selain itu, dengan adanya 'penanaman' kepada binaan Misykat untuk membiasakan diri menabung diharapkan ke depannya untuk mengembangkan usaha melalui dana mandiri.

Analisis Deskriptif Kuantitatif Manfaat Program Misykat

Analisis Uji Chi-Square digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel tingkat keberdayaan (kemandirian) responden melalui Program Misykat yang dilakukan oleh pendamping/fasilitator kelompok. Uji statistik Chi-Square diukur berdasarkan tingkat keberdayaan (kemandirian) melalui variabel

kepercayaan diri, keterampilan, variabel keilmuan, dan keyakinan sukses usaha.

Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji Chi-Square, frekuensi kepercayaan diri yang diobservasi memiliki nilai 24, sedangkan menurut H_0 frekuensi yang diharapkan hanya 12,1. Berdasarkan uji Chi-Square, didapat nilai $-p$ sebesar 0,000 artinya bahwa probabilitas kurang dari 0,05 yang berarti juga H_0 ditolak, yang berarti ada hubungan sangat nyata antara kepercayaan diri dengan program pendampingan Misykat.

Program Misykat melalui pendampingan di tingkat masyarakat memberikan metode pelatihan bagi anggota/binaan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan usaha. Salah satu kunci dari pendampingan yang dilakukan oleh Program Misykat adalah proses penyadaran melalui penumbuhan kepercayaan diri, menumbuhkan rasa membutuhkan pada diri masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup. Media pendidikan melalui pendampingan Misykat untuk orang dewasa tentunya sangat beragam, sehingga disesuaikan dengan kebutuhan kelompok penerima program.

Hasil uji hipotesis menggunakan uji Chi-Square untuk menghitung kemaknaan statistik hubungan keterampilan usaha dengan pendampingan Misykat yang disertai dengan pemberian pelatihan usaha, konsultasi usaha dan lain-lain menunjukkan bahwa frekuensi keterampilan usaha yang diobservasi memiliki nilai 26, sedangkan menurut H_0 frekuensi yang diharapkan hanya 18,7. Oleh sebab itu, berdasarkan uji Chi-Square didapatkan nilai $-p$ sebesar 0,013. Hal tersebut berarti bahwa probabilitas kurang dari 0,05 yang berarti juga H_0 ditolak, yang berarti ada hubungan sangat nyata antara keterampilan dengan program pendampingan Misykat.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) masyarakat. Berdasarkan atas penelitian yang dilakukan oleh Hadded (1990) dalam Todaro (2003) memberikan kesimpulan bahwa meningkatkan pendidikan pada kaum perempuan atau mempersempit kesenjangan gender dalam pendidikan sangat menguntungkan secara ekonomi.

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji Chi-Square untuk menghitung kemaknaan statistik hubungan keilmuan

(keagamaan) dengan pendampingan Misykat yang disertai kegiatan konsultasi dan pelatihan usaha, frekuensi keyakinan sukses yang diobservasi memiliki nilai 22, sedangkan menurut H_0 frekuensi yang diharapkan hanya 12,4. Berdasarkan uji Chi-Square, diperoleh nilai $-p$ sebesar 0,005 yang berarti H_0 ditolak. H_0 ditolak menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat nyata antara keilmuan (keagamaan) dengan program pendampingan Misykat.

Banyak ekonom yang memandang pendidikan merupakan bentuk investasi yang penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Adanya perubahan paradigma bahwa dalam pertumbuhan ekonomi tidak hanya mementingkan akumulasi modal fisik melainkan juga pembentukan modal manusia. Studi Schultz et al (1988) dalam Piet Budiono (2005) menyatakan bahwa salah satu faktor penting yang menyebabkan pertumbuhan cepat perekonomian Amerika adalah pembiayaan pendidikan yang secara relatif selalu meningkat. Telaah mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah masyarakat pedesaan dan institusi kelembagaan sebagai wadah mereka berorganisasi.

Napoleon Hill, dalam bukunya *Think and Grow Rich* (1993) dalam Piet Budiono (2005) mengatakan bahwa keyakinan adalah keadaan pikiran yang bisa dirangsang atau diciptakan oleh penegasan atau instruksi yang berkelanjutan atau terus menerus pada pikiran bawah sadar, melalui prinsip sugesti pribadi. Oleh karena itu, peningkatan taraf keyakinan yang dimiliki anggota penerima Program Misykat sangat mendukung tercapainya keberhasilan usaha. Jika para anggota Program Misykat berpikir bahwa usahanya berhasil, maka mereka akan menemukan berbagai macam jalan keluar mencapai keberhasilan. Ibrahim Al-Qu'ayyid (2005) dalam bukunya 10 Kebiasaan Manusia Sukses, menyatakan bahwa yakin akan mencapai kesuksesan dengan berpikir positif dapat mengubah hal-hal yang sulit menjadi hal-hal yang produktif dan bermanfaat, serta menggunakannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan dalam hidup.

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji chi-square untuk menghitung kemaknaan statistik hubungan keyakinan sukses dengan pinjaman dana yang dilakukan dengan pemberian pendampingan disertai kegiatan konsultasi dan pelatihan usaha, frekuensi ke-

yakinan sukses yang diobservasi memiliki nilai 21, sedangkan menurut H_0 frekuensi yang diharapkan hanya 12,4. berdasarkan uji Chi-Square, diperoleh nilai $-p$ sebesar 0,0213. Hal tersebut berarti bahwa probabilitas kurang dari 0,05 yang berarti juga bahwa H_0 ditolak. Jika H_0 ditolak menunjukkan ada hubungan sangat nyata antara keyakinan sukses dengan program pendampingan Misykat.

Analisis Efisiensi Program Misykat Sebagai Modal Usaha Dalam Meningkatkan Pendapatan

Secara realistis di lapangan, kemanfaatan dana ZIS untuk pemberdayaan ekonomi dapat dilihat melalui dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan usaha responden. Ukuran yang digunakan yaitu menggunakan metode efisiensi pendapatan dengan formula sebagai berikut:

$$Y = a + bL + cK + u$$

di mana:

Y: pendapatan (TR)

L: tenaga kerja (jam kerja per bulan)

K: adalah modal

Dengan formulasi tersebut maka didapatkan persamaan sebelum dan sesudah adanya bantuan dana ZIS untuk pemberdayaan ekonomi sebagai berikut:

a. Persamaan sebelum adanya dana ZIS

$$Y = 330572,378 + 10083,947L + 0,198K \dots\dots\dots (1)$$

Berdasarkan atas hasil perhitungan regresi sebagaimana pada persamaan (1) variabel K dan L menunjukkan konsistensi dengan teori bahwa tenaga kerja (L) menunjukkan tanda yang positif atau berbanding lurus dengan pendapatan (Y). Secara statistik, melalui uji t diketahui bahwa secara individual variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada derajat signifikansi, $\alpha = 5$ persen. Sedangkan variabel modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pada derajat signifikansi, $\alpha = 5$ persen. Berdasarkan uji F diketahui bahwa secara bersama-sama variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen pada $\alpha = 5$ persen. Nilai koefisien determinasi $R^2 = 0.183$, diartikan bahwa 18,3 persen variasi variabel

dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model, sedangkan sisanya sebesar 81,7 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

- b. Persamaan setelah adanya dana ZIS
- $$Y = 1246065,186 + 6280,658 L + 0,293K \dots\dots\dots (2)$$

Berdasarkan atas hasil perhitungan regresi sebagaimana persamaan (5.2) juga menunjukkan konsistensi dengan teori bahwa tenaga kerja (L) dan Modal (K) menunjukkan tanda yang positif. Hal ini menjelaskan bahwa tenaga kerja dan modal memiliki arah yang berbanding lurus dengan tingkat pendapatan (Y). Secara statistik, melalui uji t diketahui bahwa secara individual variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada derajat signifikansi, $\alpha = 5$ persen. Sedangkan variabel modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pada derajat signifikansi, $\alpha = 5$ persen. Berdasarkan uji F diketahui bahwa secara bersama-sama variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen pada $\alpha = 5$ persen. Nilai koefisien determinasi $R^2 = 0,14$, diartikan bahwa 14 persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model, sedangkan sisanya sebesar 86 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

Berdasarkan atas kedua persamaan hasil regresi sebelum dan setelah menerima ZIS melalui Program Misykat, dapat diketahui bahwa hanya variabel tenaga kerja saja yang konsisten terhadap teori, sedangkan variabel modal tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Hal ini dapat dijelaskan dengan temuan-temuan di lapangan berdasarkan data hasil kuesioner yang terkumpul. Berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa pendapatan responden (Y) tidak dipengaruhi oleh besarnya modal bergantung pada jenis usaha masing-masing responden. Modal besar yang dimiliki peternak tidak serta merta menghasilkan keuntungan yang besar, karena sifatnya jangka panjang dan hanya sebagai usaha sampingan, sehingga dalam jangka pendek usaha ini tidak menghasilkan keuntungan atau bahkan merugi

(belum ada penjualan tetapi biaya tetap ada). Salah satu contoh adalah usaha jamu gendong dengan modal yang relatif tidak besar (\pm Rp 80.000,-) tetapi memiliki keuntungan yang relatif besar jika dibandingkan dengan usaha lainnya dengan modal yang lebih besar (usaha kelontong, ternak, pedagang sayuran, pedagang mie ayam dan lain-lain).

KESIMPULAN

Berdasarkan atas hasil temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil adalah:

- a. Mekanisme distribusi ZIS dilakukan sesuai dengan program LAZ DPU-DT yang meliputi pendidikan, kemanusiaan, dakwah sosial dan pemberdayaan ekonomi. Program Misykat termasuk program pemberdayaan menuju kemandirian ekonomi mustahik melalui dana bergulir.
- b. Profil usaha penerima ZIS adalah pedagang, kerajinan tangan, percetakan, pembuat tempe, peternak, yang memiliki potensi dan berusia produktif.
- c. Dalam distribusi ZIS masih terdapat salah sasaran (*target error*) sebesar 91,57 % jika menggunakan kriteria kemiskinan BPS dan target error sebesar 55,56 % jika menggunakan kriteria Bank Dunia.
- d. Efektifitas penyaluran ZIS akan sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam menentukan sasaran dan pendefinisian kemiskinan yang sesuai dengan kriteria yang realistis.
- e. ZIS memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, misalnya dengan asumsi sederhana DPU-DT menghitung besarnya potensi zakat uang saja untuk kota Semarang sebesar Rp 232.526.400.000.
- f. Secara umum masyarakat penerima ZIS mendapatkan manfaat dengan adanya bantuan ZIS dan memberdayakan mereka, meskipun setelah dilakukan analisis regresi ternyata modal dari ZIS tidak mempengaruhi tingkat pendapatan mereka.

Berdasar atas hasil temuan penelitian dan analisis analisis yang telah dilakukan, maka beberapa saran penting yang dapat diberikan adalah:

- a. Regulasi pemerintah tentang pengelolaan ZIS harus diperjelas dan dipertegas dalam bentuk peraturan pemerintah dan

- pelaksanaannya agar memudahkan sistem pungutan dan operasional bagi lembaga amil zakat.
- b. Pendefinisian kemiskinan harus tepat dan realistis kemudian diikuti dengan pemberian bantuan ZIS harus sesuai target yang telah ditetapkan.
 - c. Peningkatan sosialisasi dan dakwah tentang zakat dan peranannya melalui da'i, tokoh muslim, pemerintah dan berbagai media publikasi agar masyarakat sadar ZIS dan mau menyalurkannya melalui lembaga amil zakat yang akuntabel, sehingga potensi yang besar dapat dicapai secara optimal.
 - d. Penelitian lebih lanjut tentang manfaat ZIS juga perlu dilakukan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pada program lain, seperti program pendidikan, kemanusiaan dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qu'ayyid, Ibrahim Hamd. (2005). *Al-Adat al-Asyru li asy-Syakhsiyah an-Najihah (10 Kebiasaan Manusia Sukses Tanpa Batas)*, Maghfirah, Jakarta: Fatkhurozi
- Arif Pujiyono. (2008). "Studi Efektifitas dan Efisiensi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Sebagai Dana Sosial Mandiri Dalam Mengetaskan Kemiskinan", Hibah Penelitian PHK A3 FE-UNDIP, Semarang.
- Aziz, Mukhtar. (1993). "Mengatasi Kemiskinan dalam Bentuk Pengorganisasian untuk Mengentaskan Kemiskianan", *Seri Kajian Fiskal dan Moneter*, No. 7, I, Jakarta: Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuangan.
- Badan Pusat Statistik. (2003). "Profil Usaha Kecil dan Menengah Tidak Berbadan Hukum Indonesia 2003", *Survei Usaha Terintegrasi Badan Pusat Statistik*, Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2003). "Statistik Industri Kecil dan Krajinan Rumah tangga 2003", *Survei Usaha Terintegrasi Badan Pusat Statistik*, Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2005). *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2005*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2008), *PDRB Kota Semarang*, Semarang: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Kota Semarang Dalam Angka*, Semarang: Badan Pusat Statistik
- Baharudin Bandu. (2008). Zakat Untuk Kegiatan UMKM, Makalah Seminar dan Pelatihan Zakat "Saatnya Zakat Menjadi Bagian Hidup Kita," Peduli Dhuafa Rohani Islam FE-UNDIP, Semarang.
- Chapra, M. Umer. (2001). *The Future of Economics: an Islamic Perspective* diterjemahkan oleh Amdiar Amir, dkk menjadi *Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*, Jakarta: Tim Penerbitan SEBI.
- Cholid Narbuko. (2005). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- DPU DT. (2005). "Microfinance Sebagai Solusi", *Misykat Depdaksos DPU-DT*. Bandung
- Eri Sudewo. (2006). *Buaian Potensi Zakat*, artikel Republika, diakses dari: http://groups.yahoo.com/group/filantropi_indonesia/message/2519 Download: 27 Juni 2008 10:20 WIB
- Ibnu Baaz, Abdul Aziz bin Abdullah. (2005). *Syarhu Ad-Durusi Al-Muhimmati li 'Ammati Al-Ummati*, diterjemahkan oleh Muhammad Qowwam: *Pelajaran Penting Bagi Kaum Muslimin*, Malang: Cahaya Tauhid Press.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'anil Adhim*, diterjemahkan oleh M Abdul Ghoffar E.M: *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i

- J. Supranto. (2003). *Statistik: Teori dan Aplikasi*, Edisi 6.Cet.1, Jakarta: Erlangga.
- Kahf, Monzer. (1999). "The Principle of Socioeconomic Justice in The Contemporary Fiqh of Zakah", *Journal of Islamic Economics*, Vol.1 Muharram 1420 H.
- Kian Wie, The. (1978), *From Growth to Basic Needs*, makalah.
- Mudrajad Kuncoro. (2002). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mudrajad Kuncoro. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud. (2005). *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press
- Nazara, Suahasil. (1997). *Garis Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan: Kerangka Teori Foster-Greer-Thorbecke*, Prisma 1, Januari 1997.
- Piet, Budiono. (2005). "Pendampingan Usaha Pedagang Tradisional Studi Kasus Koperasi Bagor Semarang", Tesis tidak dipublikasikan, Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UNDIP, Semarang.
- Ridwan Muhtadi. (2005). *Agama dan Kemiskinan: Usaha Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, Fakultas Ekonomi UIN, Malang
- Sabiq, Sayyid. (1995). *Fiqhu As-Sunnah*, Lubnan-Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sajogyo dan Jiwati Sajogyo. (1983). *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Sarman, Mukhtar. (1997). *Kemiskinan dan Pemebrdayaan Ekonomi Rakyat: Pelajaran dari Program IDT*, Prisma 1, Januari 1997.
- Sofyan, Eko Putra. (2006). "Zakat, Infaq, Shadaqah: Sebuah Pemikiran Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Semangat Berusaha Masyarakat Miskin Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, FE-UMS
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, Ugi. (2004). *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubayd*, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat
- Todaro, Michael P dan Stephen C Smith. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Yunus, Muhammad. (2006). *Grameen Bank (Bank Kaum Miskin)*, Terjemahan: Irfan Nasution. Jakarta: Penerbit Buku Kita.